



Agama Sebagai Institusi Sosial dalam Konflik Wajib Militer: Studi Kasus Kelompok Haredi di Israel

Religion as a Social Institution in Compulsory Military Conflict: A Case Study of Haredi Groups in Israel

Shofi Hidayatul Fitria¹, Aflah Achmad Farodis², Wiwik Setiyani³

UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: aflahachmad05@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 13-10-2026

Revised : 15-10-2026

Accepted : 17-10-2026

Published : 19-10-2026

Abstract

Religion has an identity for each group, that identity forms a morality and norms. The practice of worship that is carried out repeatedly dominates as a divine force or spiritual value, making religion have social involvement so that the term religious institution is formed. One of the phenomena of religious conflict in Israel, the Haredim group refuses to conscript into the Israel Defense Forces (IDF), this case is a suitable study in assessing the role of the Haredi minority group in forming resistance to the state. What made the Israeli high court require the Haredim group to be conscripted?, how did the Haredim group negotiate in refusing conscription?, what is the position of the state in determining the decision on conscription in the Haredim group?. This study introduces the identity of the Haredim in Israeli citizens, this finding also identifies the role of religion with the transformation of their culture to social inequality. This study uses a qualitative method to make it easier for readers to define Haredim and the state, by collecting and analyzing existing data. This article seeks to provide an understanding of how minorities hold significant political influence, religion is given the opportunity to intervene politically, although it is a minority, but the power of the state is still a religious interference, referred to as a religious institution, some of the approaches used in the territory of Israel so that the Haredim can negotiate in carrying out spiritual routines.

Keywords: *Religious Institutions, Rejection of Haredim Conscription, Israel*

abstrak

Agama memiliki Identitas bagi setiap kelompok, identitas itulah yang membentuk sebuah moral dan norma. Praktik ibadah yang di lakukan berulang kali mendominasi sebagai kekuatan illahi atau nilai spiritual, menjadikan agama memiliki keterlibatan sosial sehingga terbentuknya istilah institusi agama. Salah satu fenomena konflik agama di Israel, kelompok Haredim menolak wajib militer kedalam pasukan pertahanan Israel (IDF), kasus ini menjadi penelitian yang cocok dalam menilai peran kelompok minoritas Haredi membentuk perlawanan terhadap negara. Apa yang membuat pengadilan tinggi Israel mewajibkan kelompok Haredim dalam wajib militer?, bagaimana negosiasi kelompok Haredim dalam menolak wajib militer?, bagaimana posisi negara dalam menetapkan keputusan wajib militer terdapat kelompok Haredim?. Penelitian ini memperkenalkan identitas Haredim dalam warga negara Israel, temuan ini juga mengidentifikasi peran agama dengan bertransformasinya budaya mereka terhadap ketimpangan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memudahkan pembaca dalam mendefinisikan Haredim dan negara, dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang telah ada. Artikel ini berusaha memberikan pemahaman bagaimana minoritas memegang pengaruh politik yang signifikan, agama yang diberikan kesempatan dalam campur tangan politik, meskipun minoritas, namun kekuatan kekuasaan negara



masih menjadi campur tangan agama, di sebut sebagai institusi keagamaan, beberapa pendekatan yang di gunakan di wilayah Israel sehingga Haredim dapat bernegosiasi dalam menjalankan rutinitas spiritual.

Kata Kunci: Institusi Agama, Penolakan Wajib Militer Haredim, Israel.

PENDAHULUAN

Kebijakan Negara yang di Tolak oleh Yahudi Ultra-Ortodoks.

Pengadilan tinggi Israel telah menetapkan kebijakan wajib militer kepada kelompok Yahudi Ortodoks atau disebut sebagai kelompok Haredim pada 25 Juni 2024, dikarenakan ancaman keamanan di Israel terus menerus bertambah, membuat jumlah tentara aktif dan tentara cadangan semakin berkurang. Sebelumnya kebijakan wajib militer kepada kelompok Haredim tidak ada, pada tahun 1948 komunitas ortodoks yang terpencil diberikan pengecualian wajib militer, sehingga sebagian siswa dapat melanjutkan studi yesiva dan di beri subsidi oleh negara, sehingga mereka bergantung kepada subsidi dan keluar dari pasar kerja disaat masih produktif, namun komunitas mereka semakin membengkak sehingga subsidi terbesar di berikan kepada kelompok Yahudi Ultra-Ortodoks.

Adanya keputusan pengadilan Israel mengenai kewajiban militer terhadap kelompok Yahudi ortodoks membuat kelompok mereka melakukan aksi unjuk rasa guna menolak wajib militer yang di gelar di Tel Aviv. Konflik ini menimbulkan ketegangan yang kuat antara agama dan negara, yang membuat visi mereka saling berlawanan, ini lah yang disebut dengan ketimpangan dalam transformasi agama yang memiliki kendali, perdebatan pekerjaan, kurikulum sekuler yang menyebabkan kebijakan negara diberlakukan terhadap kelompok Haredim, perubahan ini tentunya mendesak kepemimpinan Haredim diberbagai faksinya yang sebelumnya wajib militer adalah hal tabu bagi mereka.(Hananel & Hila Lowestein Barkai 2025).

Dalam memahami konflik antara kelompok haredi dan kebijakan negara, agama tidak hanya dpandang sebagai pedoman untuk membentuk kehidupan sosial dan identitas kelompok. Haller et al. (2024) menjelaskan tentang kehidupan Yahudi ortodoks yang dipengaruhi oleh prinsip keagamaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam pendidikan dan pembentukan diri.kelompok haredi berusaha untuk mempertahankan nilai tradisional di tengah perubahan zaman.

Haredim Sebagai Komunitas Religius dan Sosial.

Tradisi Haredim ada pada saat otoritas rabinik serta, perkembanganya membentuk jaringan sosial yang membentuk perilaku kolektif. Figur yang berperan mencakup para Rabbi, orang tua serta komunitas, dengan menekankan studi Torah didalamnya, hal ini menjadikan hierarki moral yang menempatkan pembelajaran agama diatas kerja sekuler atau integrasi institusional terhadap laki-laki Haredim (Shai Khatzir & Lotem Perry-Hazan 2018). Dapat dikatakan kelompok Haredim terisolasi dengan kegiatan mereka sendiri, komunitas yang tertutup terhadap negara bagian (Leon 2016), namun perkembangan komunitas Haredim telah menghasilkan partisipasi Haredim yang lebih besar dalam politik, pendidikan tinggi dan dunia digital (Malach & Cahaner 2021).

Selain dipengaruhi oleh otoritas keagamaan, kehidupan kelompok haredi bisa dipahami sebagai kolektivisme dan tingkatan sosial. Shahar-Rosenblum et al (2025) meneliti tentang sikap kolektivisme dan konsep tingkatan sosial dalam konteks ortodoks, khususnya pada hubungan sosial



dan perilaku antar sesama. Pandangan ini relevan untuk mengerti tentang hubungan antar sesama, tanggung jawab, dan kedudukan di kelompok haredi. Dengan demikian, sikap suatu kelompok terhadap kebijakan negara dengan mempertimbangkan hubungan antara keyakinan individu dan pengaruh sosial.

Selain itu, Goldfinger dkk. (2025) mencatat bahwa kolektivisme dalam komunitas Haredi dapat diamati melalui bantuan/perhatian antaranggota. Ternyata, hubungan sosial yang tertanam dalam sebuah komunitas tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan yang sama, melainkan juga oleh sikap individu dan cara mereka memandang pihak luar. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas Haredi memiliki ikatan sosial yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya adalah setiap individu bisa

Sementara itu, Haller et al. (2024) menyatakan bahwa nilai-nilai keagamaan sangat penting dalam bidang pendidikan serta pembentukan pemahaman diri bagi masyarakat Yahudi Ultra-Ortodoks. Ajaran dan sumber-sumber keagamaan dijadikan pedoman dalam penilaian terhadap ide-ide baru guna memastikannya tetap sesuai prinsip-prinsip yang diyakininya.

Pada akhirnya, kelompok Haredi tidak selalu menolak perubahan secara utuh, melainkan dapat melakukan pertimbangan terkait perubahan tersebut berdasarkan nilai-nilai dan tradisi dari agamanya. Pada masa sosial seperti saat ini, proses seperti ini bermanfaat untuk mempertahankan identitas keagamaan dari komunitas tertentu sekaligus menghadapi perkembangan dari masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena data yang diambil berasal dari pendekatan studi kasus yang diambil dari kelompok haredi yang ada di Israel. Penelitian ini mempunyai hubungan dengan keagamaan, agama dan wajib militer. Data yang dikumpulkan berasal dari jurnal ilmiah, artikel akademik. Kemudian, dari itu semua dijadikan analisis untuk membahas ini. Analisis penelitian ini didukung oleh haller et al. (2024), yang membahas tentang prinsip keagamaan dan pembentukan di komunitas yahudi ultra ortodoks, sedangkan Shahar-Rosenblum et al. (2025) yang mengkaji mengenai kolektivisme dan kelas sosial dalam komunitas ultra ortodoks.

Data dianalisis melalui proses pemilihan informasi, pengelompokan tema dan penafsiran terhadap temuan dari sumber sumber yang digunakan. Tema analisis meliputi agama, sebagai pembentuk identitas sosial, peran rabinik dalam kehidupan komunitas, nilai kolektivisme dan hubungan antara norma keagamaan dan kebijakan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agama sebagai institusi sosial dalam kehidupan kelompok haredi

Berdasarkan jurnal ini, agama mempunyai peran penting untuk membentuk kehidupan sosial di kelompok haredi. Agama bukan hanya berhubungan dengan ibadah, tetapi juga menjadi pedoman untuk menentukan perilaku, pendidikan, hubungan sosial, dan cara masyarakat memahami perubahan yang terjadi di lingkungan mereka. Bagi kelompok Haredi, ajaran agama ini diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, agama bisa dipahami sebagai institusi sosial karena mempunyai aturan, nilai dan otoritas yang mempunyai pengaruh di kehidupan.



Haller et al. (2024), dalam penelitian berjudul *Educate the Child According to His Own Way: A Jewish Ultra-Orthodox Version of Independent Self-Construal*, membahas bagaimana pemahaman diri dan pendidikan dalam komunitas Yahudi Ultra-Ortodoks berkaitan dengan nilai-nilai agama. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kehidupan kelompok Haredi tidak dapat dipisahkan dari prinsip keagamaan yang digunakan sebagai pedoman dalam memahami berbagai persoalan. Ajaran agama, termasuk pengetahuan yang bersumber dari tradisi Yahudi seperti Talmud, menjadi bagian penting dalam membentuk cara mereka memahami diri sendiri dan lingkungan sosial.

Dalam penelitian saat ini dapat terlihat bahwa agama memainkan peran tertentu selain mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Pentingnya agama terlihat dari pengaruhnya terhadap pemahaman tanggung jawab individu terhadap keluarganya dan masyarakatnya. Nilai-nilai agama yang didapatkan sejak kecil dapat memainkan peran dalam pengambilan keputusan selama perubahan sosial. Dalam konteks Haredi pendidikan agama menjadi salah satu cara untuk menjaga kelangsungan tradisi dan identitas masyarakat.

Aspek ini menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan masalah wajib militer di Israel karena peran agama bisa menjadi penjelasan mengapa kebijakan negara tersebut tidak dapat dianggap dapat diterima oleh beberapa perwakilan dari masyarakat Haredi. Wajib militer tidak hanya berarti kepatuhan terhadap hukum negara tetapi juga bisa dianggap sebagai isu pendidikan agama, kehidupan masyarakat dan kelangsungan tradisi. Bagi anggota masyarakat yang menganggap pendidikan Taurat sebagai bagian integral dari hidup mereka maka kewajiban terlibat dalam kegiatan di luar lingkungan pendidikan agama menjadi benturan nilai.

Namun perlu dicatat bahwa penelitian oleh Haller dkk (2024) tidak mempertimbangkan isu penolakan wajib militer oleh perwakilan masyarakat tersebut. Dalam kerangka penelitian Haller dkk (2024) tidak ada sama sekali pembahasan tentang layanan militer. Koneksi antara hasil penelitian dan isu yang berhubungan dengan penolakan untuk berpartisipasi dalam wajib militer dapat dianggap sebagai analisis konteks sosial-agama dari masyarakat Haredi.

Kolektivisme dan identitas sosial kelompok haredi

Selain berperan dalam membentuk nilai keagamaan, kehidupan kelompok Haredi juga dapat dipahami melalui konsep kolektivisme. Kolektivisme merupakan pandangan yang menekankan pentingnya hubungan individu dengan kelompoknya, termasuk tanggung jawab bersama, kepedulian terhadap anggota komunitas, dan pemeliharaan hubungan sosial. Dalam masyarakat yang memiliki ikatan kelompok kuat, keputusan individu dapat dipengaruhi oleh nilai dan harapan yang berkembang di lingkungan sosialnya.

Goldfinger et al. (2025), melalui penelitian berjudul *Helping Across Boundaries: Collectivism and Hierarchy in the Ultra-Orthodox Context*, mengkaji kolektivisme dan perilaku membantu dalam komunitas Yahudi Ultra-Ortodoks. Penelitian ini melibatkan 702 partisipan dan menggunakan kerangka Horizontal and Vertical Individualism-Collectivism (HVIC) untuk memahami orientasi individu terhadap kelompok dan hierarki sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi kolektivisme cukup menonjol dalam komunitas yang diteliti, khususnya dalam bentuk kolektivisme yang menekankan keseimbangan hubungan dan kepentingan bersama.



Penelitian tersebut juga menemukan bahwa hubungan antara nilai kolektivisme dan perilaku membantu tidak selalu sederhana. Sikap konservatif berkaitan dengan kecenderungan membantu anggota kelompok sendiri, tetapi dalam penelitian tersebut juga berkaitan dengan kecenderungan yang lebih rendah untuk memberikan bantuan kepada orang di luar kelompok. Sebaliknya, kolektivisme yang seimbang dan orientasi individualisme berkaitan dengan meningkatnya perilaku membantu orang di luar kelompok. Penelitian itu juga menemukan bahwa kecenderungan pribadi untuk membantu merupakan faktor penting dalam menjelaskan bantuan kepada orang di luar kelompok.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kolektivisme tidak selalu berarti menutup diri dari masyarakat yang lebih luas. Ikatan sosial yang kuat dapat mendorong kepedulian dan kerja sama di antara anggota komunitas, tetapi batas antara kelompok sendiri dan kelompok lain juga dapat memengaruhi arah kepedulian tersebut. Dengan demikian, perilaku sosial suatu kelompok dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk nilai bersama, hubungan dengan kelompok lain, dan karakteristik individu.

Dalam konteks Haredi, kolektivisme dapat membantu menjelaskan pentingnya mempertahankan identitas komunitas serta mengikuti nilai-nilai yang dianggap penting bagi keberlangsungan kelompok. Apabila suatu kebijakan dipandang berpotensi mengubah pola kehidupan yang telah lama dipertahankan, kebijakan tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan sebagian anggota komunitas. Dalam persoalan wajib militer, kekhawatiran tersebut dapat berkaitan dengan keberlanjutan pendidikan agama, kehidupan keluarga, dan hubungan sosial di dalam komunitas.

Namun, hasil penelitian Goldfinger et al. (2025) tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa kolektivisme secara langsung menyebabkan penolakan wajib militer. Penelitian tersebut mengkaji orientasi kolektivisme dan perilaku membantu, bukan sikap terhadap wajib militer. Hubungan yang dapat ditarik adalah bahwa konsep kolektivisme memberikan kerangka untuk memahami bagaimana identitas kelompok dan tanggung jawab sosial mungkin ikut membentuk cara anggota komunitas menanggapi kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Anggota Haredi tidak dapat dianggap memiliki pandangan yang sepenuhnya sama. Walaupun terdapat nilai bersama dan ikatan komunitas yang kuat, setiap individu dapat memiliki pertimbangan yang berbeda. Karena itu, penolakan atau penerimaan terhadap suatu kebijakan perlu dipahami dengan memperhatikan keragaman pandangan di dalam komunitas tersebut.

Otoritas keagamaan dan pengaruh terhadap kehidupan sosial

Otoritas keagamaan merupakan salah satu unsur penting dalam memahami kehidupan kelompok Haredi. Dalam komunitas yang menjadikan ajaran agama sebagai pedoman utama, pemimpin agama dapat memiliki peran dalam memberikan penjelasan mengenai ajaran, mempertahankan tradisi, dan membimbing anggota komunitas ketika menghadapi persoalan baru. Otoritas tersebut tidak hanya berhubungan dengan kegiatan ibadah, tetapi juga dapat berkaitan dengan pendidikan, keluarga, dan cara masyarakat menyikapi perubahan sosial.

Haller et al. (2024) menjelaskan bahwa sumber-sumber keagamaan digunakan dalam komunitas Haredi untuk menilai kesesuaian gagasan baru dengan prinsip tradisional. Proses tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara agama dan perubahan sosial tidak selalu



berbentuk penerimaan atau penolakan secara langsung. Gagasan baru dapat dipertimbangkan melalui penafsiran terhadap sumber-sumber agama terlebih dahulu. Dengan kata lain, nilai tradisional berfungsi sebagai dasar untuk menilai perubahan yang terjadi di luar komunitas.

Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa komunitas Haredi memiliki cara tersendiri dalam menghadapi perkembangan masyarakat modern. Ketika muncul gagasan atau kebijakan baru, persoalannya tidak selalu sekadar apakah gagasan tersebut dapat diterima atau ditolak. Pertanyaan lain yang dapat muncul adalah apakah gagasan tersebut sesuai dengan prinsip agama, bagaimana penerapannya, dan apakah penerimaan terhadapnya akan memengaruhi kehidupan komunitas.

Dalam konflik wajib militer, peran otoritas keagamaan dapat menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Kebijakan negara mengenai kewajiban militer berhubungan dengan aturan kewarganegaraan dan kebutuhan pertahanan. Sementara itu, bagi sebagian anggota Haredi, keputusan mengenai pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari juga berkaitan dengan pertimbangan keagamaan. Perbedaan dasar pertimbangan tersebut dapat menimbulkan perdebatan antara tuntutan negara dan kepentingan komunitas.

Dalam konteks-konteks ini, pengaruh opini dari pemimpin agama terhadap anggota komunitas lainnya dalam memahami kebijakan pemerintah dapat menjadi signifikan. Di antaranya adalah pemimpin ideologis dan religius yang menjelaskan bagaimana suatu kebijakan tampak melalui kacamata tradisi. Namun, seseorang tidak selalu dapat mengasumsikan bahwa pilihan semacam itu akan berujung pada hasil yang sama bagi semua Haredim. Sumber-sumber yang mencerminkan posisi masing-masing pemimpin dan kelompok mengenai wajib militer, secara khusus apa yang mereka katakan atau lakukan terkait hal tersebut.

Oleh karena itu, otoritas keagamaan dapat dipelajari sebagai struktur di dalam masyarakat yang mengaitkan gagasan tentang ajaran agama dengan mata pencaharian. Konsep ini berguna dalam studi ini untuk menunjukkan bahwa perdebatan mengenai kewajiban dinas militer bagi Haredi tidak dapat dibatasi pada hukum-hukum yang mengaturnya. Diperlukan pula untuk memahami kategori-kategori keagamaan dan struktur komunitas agar dapat dilihat bagaimana kebijakan diinterpretasikan dan diperdebatkan oleh para pihak yang bersangkutan.

Hubungan antara tradisi keagamaan dan Perubahan Sosial

Haller dkk. mengidentifikasi dan membuktikan salah satu temuan kritis (2024), bahwa tradisi keagamaan dan pemikiran kontemporer memungkinkan untuk tidak sepenuhnya saling bertentangan. Makalah ini berfokus pada bagaimana diri sebagai individu dapat menyesuaikan diri dan diekspresikan dalam konteks nilai-nilai keagamaan yang terkait dengan pendidikan Haredi. Sejauh para guru dibedakan sebagai berbedamemandang anak-anak seperti itu dari segi kapasitas dan karakteristik, pemahaman ini masih diperdebatkan melalui kehidupan keagamaan.

Selanjutnya, analisis ini menguraikan tentang penyesuaian pemikiran modern berdasarkan rujukan agama. Artinya, sekadar mempertahankan tradisi tidak mengharuskan untuk menolak semua perubahan. Anda bisa memilih, menafsirkan, atau memodifikasi beberapa gagasan agar sesuai dengan nilai yang ingin Anda miliki. Namun di sini Anda melihat adanya tarik-menarik antara tradisi dan perubahan sosial.



Konsep sentral memanfaatkan temuan-temuan ini untuk menilai konflik-konflik terkait wajib militer dijelaskan dalam sebuah narasi yang sama-sama menarik mengenai praktik perencanaan pertahanan nasional. Saat membahas topik ini, kita harus menghindari pelabelan sekte Haredi sebagai sepenuhnya resisten terhadap perubahan. Penilaian mengenai dampaknya terhadap kehidupan keagamaan, pendidikan, dan relasi sosial juga dapat membentuk politik terkait kebijakan negara. Karena itu, penerimaan terhadap wajib militer harus dipandang sebagai bagian dari keterjalinan antara aturan-aturan yang dipaksakan oleh negara di satu sisi dan keyakinan-keyakinan yang lazim di sisi lain.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kelompok Haredi adalah sebuah komunitas dengan kehidupan sosial yang sangat ditentukan oleh ajaran agama, otoritas rabinik, dan hubungan antar anggotanya. Agama memainkan peran penting dalam kehidupan mereka baik dalam hal ibadah maupun pendidikan.

Selain itu, agama mempengaruhi cara hidup, nilai-nilai sosial, dan sikap kelompok terhadap perubahan di masyarakat. Selain itu, Dödtmann (2022), menambahkan bahwa pengaturan hubungan antara negara dan agama di Israel memberi peluang bagi kelompok Haredi untuk mempertahankan sistem pendidikan dan kehidupan keagamaannya. Hal ini memperkuat kemandirian komunitas Haredi, namun pada sisi lain menciptakan hubungan kompleks antara kepentingan agama dan kebijakan negara.

Temuan penelitian Goldfinger et al., 2025 mengindikasikan bahwa sikap kolektivisme memainkan peran penting dalam kehidupan para Haredi karena menyumbang kepada rasa kebersamaan dan dorongan untuk melaksanakan tindakan saling membantu. Meskipun demikian, peneliti juga menemukan bahwa sikap bantuan bisa berbeda bergantung hubungan seseorang dengan kelompoknya.

Hallers et al. (2024) menyatakan bahwa nilai-nilai tradisional dari aspek keagamaan juga bisa berpadu bersama sejumlah gagasan modern dalam memandang karakter serta kemampuan setiap anak. Dengan kata lain, temuan penelitian tersebut memberi gambaran bahwa komunitas Haredi tidak selalu menolak semua bentuk perubahan namun lebih mempertimbangkannya sesuai dengan nilai serta ajaran agamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chananel Goldfinger, Shomi Shahar-Rosenblum, Itschak Trachtengot 3 and Nechumi Malovicki-Yaffe *Helping Across Boundaries: Collectivism and Hierarchy in the Ultra-Orthodox Context*
- Eik Dödtmann *Haredi Fundamentalism in the State of Israel How the status quo between state and religion provides ground for a modern religious counter-collective*
- Guy Hochman *Collective self-justification and resistance to integration: behavioral and social mechanisms within the Israeli ultra-orthodox community*
- Matan Aharoni, Hananel Rosenberg & Hila Lowenstein-Barkai *Shaping the ultra-Orthodox man's self-image: differentiation, classification, and otherness in poster campaigns against conscription*
- Rachel Haller, Louis W. C. Tavecchio, Geert-Jan J. M. Stams & Levi van Dam *Educate the child according to his own way: a Jewish ultra-orthodox version of independent self construal*